



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026



Visi :

Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera,
Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani

Misi I :

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih,
akuntabel dan melayani

Kata Pengantar

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2026 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2026 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja Tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra 2025-2029.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah, memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 serta untuk *mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya.

Lubuk Basung, November 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Agam



ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820807 200112 2 002

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	36
4.1 Program dan Kegiatan	36
BAB V PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Kominfo ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kominfo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Didasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersih (*good and clear governance*) dan profesional yang didukung dengan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

1. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. **Sedangkan tujuan dari penyusunan** Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun ini. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tahun 2025, capaian rencana kerja tahun 2024 (n-1) dan capaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika pada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025 antara lain :

1. Program Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan:** Pengelolaan e-governement di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/ Kota.

Bertujuan: untuk menyediakan fasilitas penunjang data center secara bertahap dan terkelolanya server-server yang digunakan oleh pemerintah kabupaten agam secara terpusat,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. Rp.2.054.902.828,- realisasi Rp. 1.210.990.293,- kegiatan yang telah dilaksanakan berupa, pemeliharaan server dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas data center, Menyediakan layanan video conference dan live streaming, mendukung program unggulan nagari creative hu berbasismesjid, pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi (*simpeg, e-surek, sikap dan asensi online, Simaju, SPMB online*) dalam rangka mewujudkan program e-government yang terintegrasi di Kabupaten Agam, menyediakan akses internet terpusat agar bias dikelola dengan baik yang akan digunakan untuk aparaturnya Pemkab Agam dan penyediaan WIFI gratis untuk public guna meningkatkan informasi dan komunikasi bagi masyarakat.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan: Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dalam meningkatkan penyebaran fasilitas informasi melalui media digital maupun media cetak.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.054.982.828,- terealisasi sebesar Rp. 1.210.990.293,-

Hasil Yang Dicapai terkelolanya media komunikasi pelayanan publik seperti: Website, Media Sosial, Media Cetak, Youtube, PPID.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk Tersedianya data yang lengkap dan akurat sebagai bahan dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah (*buku agam dalam angka tahun 2025, buku statistic sektoral kabupaten agam tahun 2025, buku profil daerah tahun 2025*)

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.721.400,- terealisasi sebesar Rp. 61.411.370,-

Hasil Yang Dicapai tersusunnya buku *buku agam dalam angka tahun 2025, buku statistic sektoral kabupaten agam tahun 2025, buku profil daerah tahun 2025*, terpublikasinya data yang dihasilkan oleh produsen data (OPD) di portal satu data indonesia kabupaten agam dan SIPD RI module e-Walidata.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.042.500,- terealisasi sebesar Rp. 31.741.000,-

Hasil Yang Dicapai adalah terlaksananya audit aplikasi, diikuti peningkatan kapasitas SDM persandian serta terbitnya sertifikat elektronik.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn Berjalan (Thn 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan			4.076.232.544	3.865.255.791	94.82	4.364.835.121,28	4.199.089.841	97,18

				Daerah	ASN								
				Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.710.000	50.529.250	96,64			
				- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			3.087.218.253	2.983.069.682	96.63	3.715.197.121	3.610.574.525	97,14
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD						53.110.000	53.110.000	100
				- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			414.517.323,-	374.542.764,-	90.36	255.527.902	222.898.352	98.75

				Pengad aan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemer- intah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			77.071.940,-	56.009.500,-	73,39	83.560.000	63.753.50 0	76, 30
				- Penyed iaan Jasa Penun- jang Urusan Pemer- intah Daerah				334.920.028	319.054.779,-	90,36	269.391.018 ,72	238.495. 839	
				- Pemeli haraan BMD Penun- jang Urusan Pemer- intah Daerah				111.795.000,-	82.049.945	73,39	71.160.000	85.586.62 8	92 ,14
				Urusan Pemerint ah Bidang Komunik asi Dan Informasi				1.314.844.338	901.486.624	68,86	1.620.641.3 26	551.628. 854	34 ,84

				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			1.314.844.338	901.486.624	68,86	1.620.641.326	551.628.854	34,84
				- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				1.314.844.338	901.486.624	68,86	1.620.641.326	551.628.854	34,84
				Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (%)			1.555.433.456	1.292.928.480,-	83.12	2.054.982.828	1.210.990.293	58,93
				- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemeri				605.000.000	604.834.093.880,-	99.97	-	-	-

				ntah Pusat dan sub domain Pemka b/Kota									
				Pengel olaan e- govern ment di lingku p Pemer intah Daerah Kabup aten				950.433.456,-	688.093.880,-	72.40	2.054.982.828	1.210.990.293	58,93
				Program Penyelen ggaraan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunaka n data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembanguna n daerah			136.998.820	58.289.100	36.71	65.411.320	61.411.370	93,44

				Penyelenggaraan Statistik Sektor al di Lingkup Daerah Kabupaten				136.998.820	50.289.100	36,71	65.411.320	61.411.370	93,44
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi			25.500.000,-	12.133.700,-	47,58	6.551.000	6.410.900	97,86
				Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				25.500.000,-	12.133.700,-	47,58	6.551.000	6.410.900	97,86
			2023	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	2.960.272.426	2.777.426.200						

				ahan Daerah	operasional kantor dan ASN								
				- Admini strasi Keuan gan Perang kat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	1.999.798.170	1.908.145.075						
				- Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	466.107.926	433.720.428						
				- Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Peme ri ntah		83,492,000	71.110.000						
				- Penyed iaan Jasa Penunj ang Urusan Peme ri ntah Daerah		322.658.250	303.633.115						

				- Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		88.215.000	76.817.582						
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	1.221.588.352	1.180.590.035						
				- Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota		1.221.588.352	1.180.590.035						
				Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem	2.025.677.908	1.635.689.000						

					penghubung layanan pemerintah (%)								
				-	Pengel olaan nama domain yang telah ditetap kan oleh Pemer intah Pusat dan sub domain di lingku ngan Pemer intah Daera Kabup aten/K ota		576.000. 000	1.635.689.85 4					
				-	Pengel olaan e- govern ment di		1.447.67 7.908	1.065.689.85 4					

				lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten									
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	102.451.000	92.033.400						
				- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten		102.451.000	92.033.400						

				Program Penyelen ggaraan Persandia n untuk pengama nan Informasi	Indeks keamanan informasi	35.042.5 00	31.741.000						
				- Penyel enggar aan Persan dian untuk penga manan Inform asi Pemer intah Daerah		35.042.5 00	31.741.000						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2023. Dua jenis pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan Pengelolaan E-Government (Infrastruktur jaringan internet, Aplikasi dan Sarana Prasarana)

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional, melalui :

- a. Media massa, seperti majalah, radio dan televisi
- b. Media online, seperti website (media online)
- c. Media tradisional, seperti pertunjukan rakyat
- d. Media interpersonal, seperti sarasehan, ceramah, diskusi, dan lokakarya
- e. Media luar ruang, seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho

3. Pengelolaan Statistik Sektor.

Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor

4. Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika terkait pelayanan dasar adalah tersedianya layanan informasi melalui perangkat elektronik untuk peningkatan penyebarluasan informasi. Indikatornya adalah jumlah layanan informasi melalui perangkat elektronik, seperti, website Pemerintah Kabupaten Agam, media massa dan media sosial seperti facebook, you tube, twitter dan instagram.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Keterangan	
						Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
16. Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2.56	2.66	2.96	Penambahan Dokumen Buku Arsitektur SPBE	
2	Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	79.78	79.79	84.8	1. Perlengkapan indikator Dari lima indikator yang dinilai, dokumen dan bukti dukung yang disampaikan lebih lengkap dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa poin dalam setiap indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi. 2. Komitmen organisasi Pada indikator komitmen organisasi, nilai mengalami peningkatan signifikan karena pada saat pemaparan PPID dalam kegiatan E-Monev se-Sumatera Barat, Kabupaten Agam dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Agam untuk menyampaikan paparan. 3. Inovasi layanan informasi publik Terdapat inovasi berupa layanan	
3	Indeks domain kebijakan internal SPBE	Nilai	2.6	2.61	2.6	2.	Perda SPBE belum selesai dan masih dalam bentuk Draft
4	Indeks domain tatakelola SPBE	Nilai	1.8	1.81	2.8	Penambahan Dok. Peta Rencana SPBE	
5	Indeks domain manajemen SPBE	Nilai	1.45	1.46	2.18	Belum ada Tim Audit yang memiliki Sertifikat TIK	
6	Indeks Domain layanan SPBE	Nilai	3.37	3.38	3.43	Penambahan Dokumen terkait layanan publik berbasis elektronik	
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PD	20	20	20		
8	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
9	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	5	5	5		
10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		70	167	Karena masyarakat dapat menyampaikan secara cepat dan tepat aspirasinya lewat layanan publik yang kita sediakan.	
11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	%	100	100	100		
20. Urusan Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.75	2.77	-		BPS tidak melakukan penilaian indeks IPS 2025
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OP) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	82	88	1. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral 2.Sudah banyak OPD mengacu pada statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OP) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	80	82	81		OPD belum paham tentang data statistik yang sudah dikelola
21. Urusan Persandian							
1	Indeks KAMI (terkait Keamanan)	Nilai	338	340	340	Perlu membuat dokumen SMKI (Sistem Manajemen Kemanan Informasi)	Rendahnya nilai resiko pengelolaan keamanan informasi
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	100		
3	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	KAMI	338	340	340		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	2.56	2.66	2.96	Penambahan Dokumen Buku Arsitektur SPBE	
2	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	indeks	45.3	53.0	53.86		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	• Konektivitas Broadband Nasional (implementasi 4G dan konsolidasi operator telekomunikasiCyber Security & Governance, e-Government, e-Commerce. • Digitalisasi Televisi. • <i>Government Public Relation</i>	• Penyediaan dan pengelolaan informasi komunikasi publik • Pengelolaan aplikasi informatika • Pengelolaan persandian untuk keamanan informasi • Penyelenggaraan statistik sektoral • Tata kelola organisasi	• Akses masyarakat masih terbatas terhadap informasi di beberapa kecamatan • Terbatasnya sarana dan prasarana TIK, telekomunikasi dan penyiaran • Terbatasnya SDM yangtrampil dan profesional di bidang TIK, Kominfo, Persandian dan Statistik • Belum tersedianya Masterplan e-government	• Adanya Regulasi Pemerintah Pusat di bidang Kominfo, persandian dan statistik • Ketersediaan dana pembangunan APBN/APBD/ Swadaya • Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Aset yang ada. • Optimisme Kepala Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kab. Agam	

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	• Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	• Dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan dan kesiapan SDM di bidang teknologi informasi lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya.” PNS yang mempunyai kemampuan TIK di beberapa kantor OPD Kabupaten Agam yang telah memanfaatkan Teknologi	• Belum adanya Jaringan GSM di beberapa wilayah di 4 Kecamatan • Masih terbatasnya sambungan telepon otomatis di beberapa kecamatan	• Pengembangan sistem jaringan di upayakan selalu mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi • Sentral Telepon Otomatis (STO) telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan kabel Optic • Jumlah BTS yang ada saat ini sebanyak 121 BTS tersebar di beberapa Kecamatan • Pengembangan sistem jaringan diupayakan selalu mengikuti perkembangan

		Informasi dan Komunikasi, hanya sebagai kecil orang saja, dan beberapa diantaranya belum tentu berlatar belakang pendidikan di bidang Informatika.		teknologi telekomunikasi
--	--	--	--	--------------------------

B. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

a. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Era globalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kedalam isu strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang dan waktu. TIK berkembang sangat cepat dan hampir seluruh aspek kehidupan telah menggunakan TIK. Keberadaan TIK membuat aktifitas yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan dan hiburan terakait erat dengan pemanfaatan TIK. Menyusun dokumen elektronik, melakukan perhitungan, menganalisa data dan sebagainya baik di masyarakat maupun organisasi pemerintahan sekalipun.

b. Peningkatan Layanan telekomunikasi dan internet

Kedudukan telekomunikasi dan internet telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah. Semuanya sudah hampir mengenal internet dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan, baik elemen pemerintah daerah (government), masyarakat (consumer/citizens) dan kalangan bisnis (business). Ketersediaan layanan ini akan memperlancar hubungan dan transaksi elektronik diantara elemen tersebut yaitu hubungan C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, G2C. Hampir semua transaksi yang

terjadi saat ini telah menggunakan internet, seperti transaksi perbankan dan transaksi-transaksi lainnya.

c. Pengaturan menara telekomunikasi

Untuk memenangkan persaingan, para operator telekomunikasi akan selalu berusaha meningkatkan layanannya, maka keberadaan menara BTS menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas coverage area bagi para pengguna jasa telekomunikasi.

Dengan perubahan kewenangan terkait telekomunikasi yang saat ini berada dibawah Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, maka pemerintah pusat memegang kendali penuh atas Regulasi & Kebijakan, pengawasan dan infrastruktur strategis (pengaturan telekomunikasi yang bersifat nasional dan lintas batas negara/daerah). Sementara itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terbatas yang umumnya hanya mencakup Fasilitasi & Dukungan, dimana pemerintah daerah membantu penyediaan infrastruktur pasif telekomunikasi (seperti tiang dan saluran kabel) sesuai dengan tata ruang wilayah serta pemberian izin, terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pendirian menara atau infrastruktur fisik lainnya.

d. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta berkaitan dengan kepentingan publik merupakan informasi publik terbuka. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 64 (1). Dengan diterbitkannya undang-undang keterbukaan Informasi Publik berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebagai lembaga publik harus mengedepankan hak setiap masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi yang

berasal dari setiap organisasi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dengan seluas-luasnya selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Akses terhadap informasi publik tersebut dapat diperoleh baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang ada saat ini.

e. Statistik Sektoral

Statistik sektoral merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi saat ini, untuk pelaksanaan urusan statistik sektoral di Kabupaten Agam belum terakomodir dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelum ini pelaksanaan urusan statistik sektoral dilaksanakan oleh Bappeda. SOTK Bappeda pun saat ini tidak mengakomodir pelaksanaan urusan statistik sektoral.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu segera dilakukan analisis dan revisi kelembagaan perangkat daerah yang ada agar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik dapat dilaksanakan.

f. Persandian untuk keamanan informasi

Belum memiliki aparatur ahli sandi ataupun fungsional persandian
Masih rendahnya pemahaman terhadap implementasi persandian

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sehingga tidak ada perubahan dalam program dan kegiatan. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 program 11 kegiatan seperti Tabel di bawah:

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN
TAHUN 2026

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Agam	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor ASN	100	
	Adminstarsi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Agam	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	40 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Agam	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab.Agam	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	100	
	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas	-	

			Kab/Kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab.Agam	Jumlah pembangunan Aplikasi e-government	100	
	- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Jumlah Kegiatan pengelolaan e-gov yang dilaksanakan(aplikasi, Sarpras, infrastruktur)		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab.Agam	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	100	
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kab.Agam	Kab.Agam	Jumlah penyusunan data statistik sektoral yang dilaksanakan	-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab.Agam	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	340	
	- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik/ non elektronik	Kab.Agam	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi		
	Jumlah				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan Peraturan-peraturan lainnya seperti:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah yang

memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen dan pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penerapan sistim pemerintahan berbasis elektronik	Persentase OPD yang telah menerapkan SPBE	2,63
		Meningkatnya kualitas data dan layanan informasi.	1. Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peringkat keterbukaan informasi badan publik	2,35 79,81
		Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	340
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	74

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk tahun 2026 mempunyai Lima Program, sembilan kegiatan dan dua puluh tujuh sub kegiatan dengan total dana sebesar Rp.,- (Sembilan miliar lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) seperti daftar terlampir:

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam, pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Komunikasi dan Informatika serta faktor pengembangan kecamatan. Jumlah program yang direncanakan pada Tahun 2026 adalah 3 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan lokasi program adalah wilayah Kabupaten Agam. Total kebutuhan dana /pagu indikatif sejumlah Rp. 6.137.172.115,36,-

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tahun 2026 seperti tabel berikut:

Tabel 4.1

**Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab.Agam Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan asn	Disko minfo	100 persen		DAU		100 persen	90,000 ,000
	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaa n keuangan perangkat daerah		100 persen	3.556.882.873,36			100 persen	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		40 Orang / Buln	3.502.572.873.36			40 Orang / Buln	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan /		12 Laporan	54.310.000			12 Laporan	

			Semesteran SKPD						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD		100 persen			100 persen	45,000,000
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.993.675		1 Paket	5.500.000
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	29.144.882		4 Paket	45,000,000
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan		4 Paket	14.650.260		4 Paket	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	223.522.800		12 Laporan	275.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin		3 Unit	25.410.000		3 Unit	45,000,000

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lainnya							
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		-				4 unit	45.000.000
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 unit	7.410.000			4 unit	45,000,000
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	8.000.000			1 unit	8.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional		100 persen	340.359.994			100 persen	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	50.543.994			36 Laporan	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	289.816.000			12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 persen	105.832.000			100 persen	

	-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	85.500.000			3 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 unit	10.040.000			20 unit	
	-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	10.292.000			1 unit	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Dis komi nfo	45 persen	623.973.959	DAU		45 persen	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase informasi public yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No 14		100 persen	623.973.959			100 persen	

			Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik						
	-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		6 media	623.973.959		6 media	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Dis komi nfo	50 persen	1.222.401.672	DAU	50 persen	1,850,000,000
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE		95 persen	1.222.401.672		95 persen	1,850,000,000
	-	Penyelenggaraan Pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		1 Dokumen	48.000.000		1 Dokumen	

	-	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		5 aplikasi	399.500.000		5 aplikasi	550,000.000
		Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				-			550,000.000
	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		44 perangkat	198.901.672		44 perangkat	250.000.000
	-	Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		20 perangkat daerah	576.000.000		20 perangkat daerah	750,000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Dis komi nfo	40 Perse n		DAU	40 Perse n	

		dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah							
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah		-	-	-	-	-	2000.000.000
-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah indeks keamanan informasi	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	-	-	-	-	-	-	-

	-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		-	-	-	-	-	35.00 0.000
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	------------------------

BAB V

PENUTUP

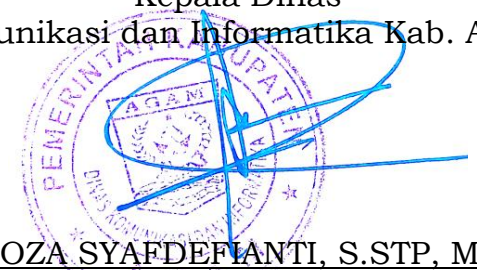
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2026 dengan mengaju kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahun ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Diskominfo, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan:

1. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan Pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi.

Akhirnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab. Agam



ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820807 200112 2 002